



**RENCANA KERJA
TAHUNAN (RKT)**

2023



KATA PENGANTAR

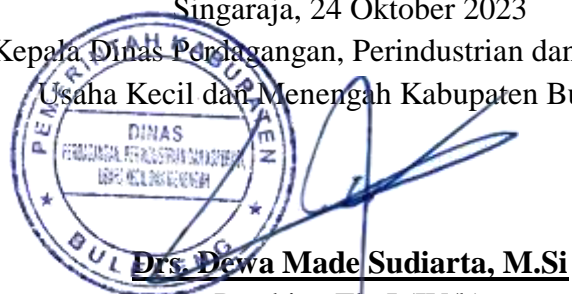
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dalam melaksanakan tupoksi Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng



Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19741014 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	2
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng	1
BAB II RENCANA STRATEGIS.....	1
2.1 Visi	1
2.2 Misi	1
2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	2
2.4 Indikator dan Target Kinerja.....	4
BAB III PENUTUP	5
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka upaya mewujudkan Good Governance, pengembangan dan informasikinerja terus diintegrasikan kedalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasiskinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dankebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD, salah satunya melalui Penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah).

Salah satu instrument SAKIP yang dipergunakan adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dari masing-masing SKPD guna penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan sebagai bentukkomitmen SKPD dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahunesuai dengan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 disusun berdasarkan RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3 Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rencana Kinerja Tahunan adalah :

- a. Intensifikasi dalam upaya pencegahan korupsi.
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif.
- d. Transparatif dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;
- d. Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng merupakan SKPD yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM yang pelaksanaannya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Dalam pencapaian kinerja harus terukur dan dituangkan dalam Rencana Strategis Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk dijabarkan ke dalam rencana Kerja serta dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan setiap tahun sebagai bahan evaluasi kinerja. Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemeritahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

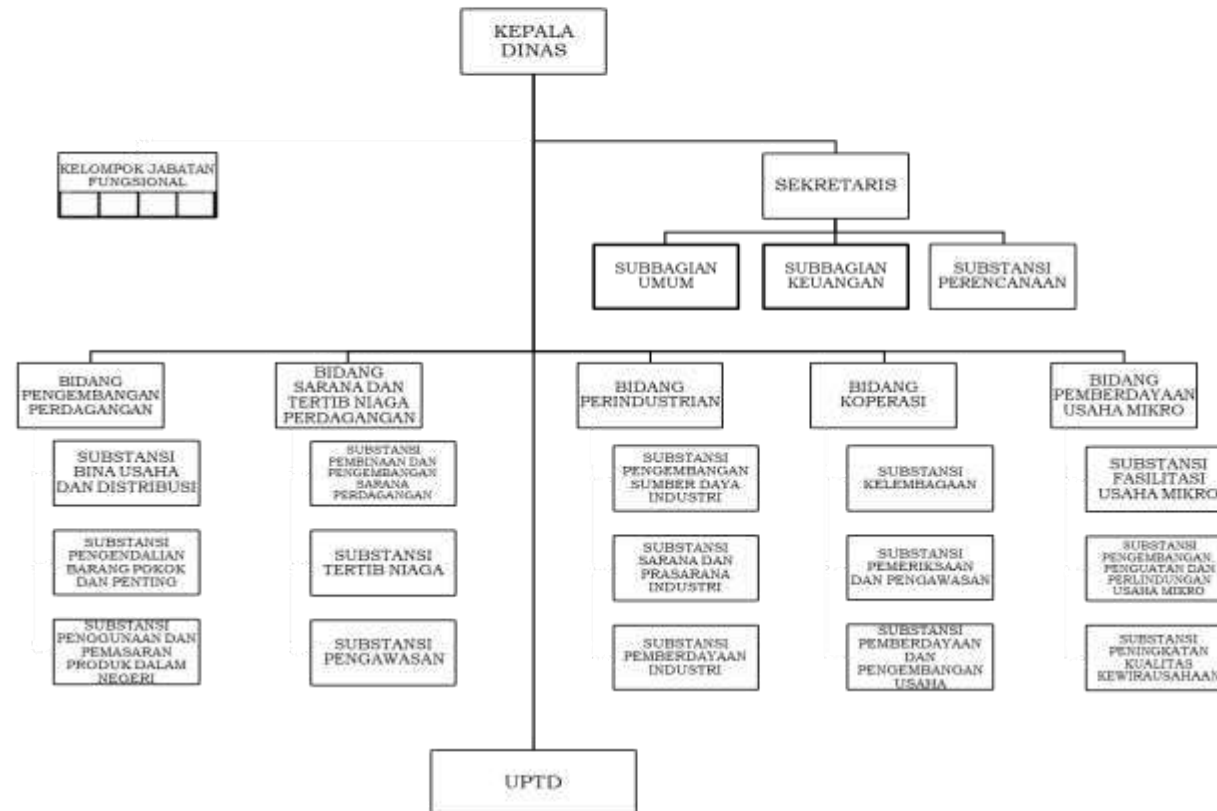
2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Perdagangan dan bidang Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

1.4.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng

Bagan susunan Struktur organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021, terdiri dari :



BAB II

RENCANA STRATEGIS

Dokumen Rencana Strategis Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegritas dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Rencana Strategis Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2023-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

2.1 Visi

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta para pemangku kepentingan maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2023-2026, Pemerintah Daerah mencanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng yaitu: ***“BULELENG KERTA RAHARJA MENGANTARKAN BALI DWIPA JAYA BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”***.

Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan. Demikian juga SKPD Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai kewajiban untuk mewujudkannya melalui perumusan Visi yang searah dan selaras dengan Visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggaraan pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 tahun kedepan sebagaimana di uraikan dalam RPD Kabupaten Buleleng 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
3. Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.
4. Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya.
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

Mencermati Misi dimaksud, maka menjadi kewajiban bagi Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk menjabarkan sesuai Tupoksinya yang berada di point kedua dalam RPJPD Kabupaten Buleleng 2023-2026.

2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta dalam rangka perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPD, maka disusun dan dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Mencermati dari tugas pokok serta rumusan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng menetapkan tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun ke depan 2023-2026. Tujuan dan sasaran Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng terdapat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

No	Kinerja Utama atau Tujuan/ Sasaran Strategis/ Hasil (outcome)	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke -	
				2023	2024
1	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi daerah	3.3%	3.5%
			Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	78,14%	78,59%
			Persentase UMKM Formal	19%	20%
			Persentase UMKM Naik Kelas	1,6%	1,7%
			Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	78,50%	79,00%
			Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	82%	83%
			Persentase Kemitraan UMKM	100%	100%
		Stabilisasi harga bahan pokok penting	Laju inflasi	2.5-3.5%	2.5-3.5%
			Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting	100%	100%
		Terwujudnya Pelayanan Publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,01%	80,01%

2.4 Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan SAKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam SAKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Kinerja (RKT) Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (*outcomes*) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu. Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2023 sebagai Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan.

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini merupakan komitmen Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan oleh masing-masing bidang dilingkungan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi.

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng



Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si †

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19741014 199311 1 001



LAMPIRAN

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG

No	Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Target/ Satuan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Target/ Satuan	Anggaran	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Kinerja (Output)			
1	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi daerah	3,30%	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM koperasi yang berkompeten	60 orang	119.383.250	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen analisis koperasi primer yang di awasi	12 dokumen	119.383.250	
		Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	78,50%	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota			280.665.065	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah laporan koperasi yang dinilai manajemen umum, aktiva, likuiditas, efisiensi usaha simpan pinjam, manajemen likuiditas keuangan dan kepatuhan prinsip usaha syariah koperasi	20 laporan	280.665.065	
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koperasi yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) tepat waktu	12 laporan	67.124.579	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan monev kelembagaan koperasi dan usaha koperasi	20 laporan	67.124.579	
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen koperasi yang memiliki legalitas formal	50 dokumen	77.400.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koperasi yang berkembang sesuai dengan regulasi	20 laporan	77.400.000	
										Jumlah koperasi yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan terhadap pengawas internal dan pengurus koperasi	1 laporan		
										Jumlah laporan koperasi yang dipantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan penerapan sanksi administratifnya	5 laporan		

No	Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Target/ Satuan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Target/ Satuan	Anggaran	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Kinerja (Output)			
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koperasi yang memiliki ART (Anggaran Rumah Tangga)	12 laporan	59.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	15 dokumen	59.000.000	
		Persentase UMKM Formal	20%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah laporan UMKM yang terdata	2 laporan	443.963.160	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang Terdata	2 laporan	116.939.368	
						Jumlah laporan produk unggulan UMKM Kabupaten Buleleng	12 laporan		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah laporan data produk unggulan Kabupaten Buleleng	12 laporan	88.664.990	
						Jumlah laporan UMKM yang memiliki NIB	12 laporan		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah laporan UMKM yang telah memiliki NIB	12 laporan	29.012.552	
									Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			73.346.250	
						Jumlah laporan pelaku UMKM yang bersertifikat	4 laporan		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah data pelaku UMKM yang bersertifikat	4 laporan	136.000.000	
		Persentase UMKM Naik Kelas	1,60%	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			1.022.077.777	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			1.022.077.777	
		Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	82%	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah laporan sarana distribusi pasar yang kondisi baik, sedang dan rusak	20 dokumen	592.308.454	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Laporan hasil Pengecekan Kondisi Pasar	9 laporan	592.308.454	

No	Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Target/ Satuan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Target/ Satuan	Anggaran	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Kinerja (Output)			
				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah laporan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP	12 laporan	349.760.425	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah laporan pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP	12 laporan	260.090.813	
			Jumlah surat keterangan hasil pengujian			30 dokumen	Jumlah Surat Keterangan Hasil Pengajuan			12 dokumen			
			Jumlah dokumen kebijakan pengamanan dan perlindungan konsumen yang sesuai dengan aturan			2 dokumen	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah dokumen Kebijakan Pengamanan perlindungan konsumen yang sesuai dengan aturan	2 dokumen	89.669.612		
			Jumlah laporan kesesuaian UTTP dan BDKT/B2 terhadap ketentuan yang berlaku			12 laporan			Jumlah dokumen pembinaan perlindungan konsumen	24 dokumen			
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah dokumen pemahaman dan fasilitasi tertib niaga	24 dokumen	63.317.703	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			63.317.703		
		Persentase Kemitraan UMKM	100%	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan	12 laporan	167.866.310	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Produk unggulan Daerah	20 dokumen	167.866.310	
						Jumlah promosi produk unggulan yang diselenggarakan	12 laporan			Jumlah promosi produk unggulan daerah yang diselenggarakan	12 dokumen		
		Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	6.20%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah perencanaan pembangunan dan pelaporan sektor perindustrian	12 laporan	843.266.731	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah laporan pembahasan draft Ranperda RPIK Buleleng	4 laporan	691.070.548	
						Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sektor perindustrian	12 laporan		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen konsep pedoman penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen	152.196.183	
						Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan industri	12 laporan			Jumlah kajian/data sentra IKM	12 laporan		
										Jumlah laporan kunjungan dan jasa konsultasi usaha kepada pelaku/keompok usaha	12 laporan		

No	Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Target/ Satuan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Target/ Satuan	Anggaran	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Kinerja (Output)			
										Jumlah laporan pelatihan IKM/UMKM	6 laporan		
										Jumlah pendampingan IKM pada promosi pameran Perindustrian dan Perdagangan	6 pameran		
										Jumlah dokumen rencana kegiatan evaluasi	1 dokumen		
										Jumlah dokumen monev kegiatan pembangunan industri	1 dokumen		
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengolahan data dan informasi sektor perindustrian	12 laporan	68.855.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan pemenuhan dokumen kelengkapan perijinan dan rekomendasi	12 laporan	68.855.000	
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan bagi IKM							12 laporan			
			Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan data dan informasi sektor perindustrian							12 laporan			
			Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi program pemerintah bagi masyarakat di sektor perindustrian							12 laporan			

No	Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Target/ Satuan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Target/ Satuan	Anggaran	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Kinerja (Output)			
2	Stabilisasi harga bahan pokok penting	Laju inflasi	2.5%	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sub distributor stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	12 laporan	151.375.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah sub distributor stok barang kebutuhan pokok barang penting	12 laporan	151.375.000	
					Jumlah operasi pasar dan/atau pasar murah	12 laporan	Jumlah operasi pasar dan/atau pasar murah			10 laporan			
		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting	100%		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah monev/pemantauan ketersediaan barang, pasokan barang, harga barang pokok dan penting yang sesuai ketentuan	12 laporan	118.679.500	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah monev /pemantauan ketersediaan barang pasokan barang ,harga barang pokok dan penting yang sesuai ketentuan	12 laporan	118.679.500	
3	Terwujudnya Pelayanan Publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.01%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP yang baik	68.30%	496.951.897	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP	7 dokumen	309.730.949	
						Jumlah dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban tepat waktu	16 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	6 dokumen	187.220.948	
										Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ	2 dokumen		
										Jumlah dokumen SOP (Standar Operasional Prosedur)	2 dokumen		
										Jumlah dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 dokumen		
										Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan		
										Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	12 laporan		

No	Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Target/ Satuan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Target/ Satuan	Anggaran	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Kinerja (Output)			
										Jumlah dokumen Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Dokumen Zona Integritas (ZI)	3 dokumen		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	12 laporan	7.214.002.294	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan	24 dokumen	7.021.603.556	
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan	12 laporan	192.398.738	
										Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	1 dokumen		
										Jumlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan yang terverifikasi	12 laporan		
										Jumlah laporan Bendahara Pengeluaran	12 laporan		
										Jumlah laporan Bendahara Penerimaan	12 laporan		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	12 laporan	3.584.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian	12 laporan	3.584.000	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Tata Kelola Administrasi Perkantoran	12 laporan	379.273.825	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan Tata Kelola Administrasi Perkantoran SKPD	12 laporan	59.437.775	
				Jumlah laporan pelayanan publik		12 laporan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			92.191.050			
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor			129.629.700			
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.179.500			
							Fasilitasi Kunjungan Tamu			25.437.800			
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			65.398.000			

No	Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Target/ Satuan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Target/ Satuan	Anggaran	Ket	
	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Kinerja (Output)				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.181.475.784	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				303.018.631		
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					310.760.000	
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					255.259.200	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					312.437.953	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		352.052.737	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				208.791.065		
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					113.811.672	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					29.450.000	
Total								14.052.383.491				14.052.383.491		

Singaraja, 24 Oktober 2023
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Kabupaten Buleleng Menengah Kabupaten Buleleng



Drs. Dewa Made Suliarta, M.Si
NIP. 19741014 199311 1 001